

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia tengah berusaha untuk terus melakukan pembangunan terhadap daerahnya dengan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang terus dilakukan pemerintah kota Medan untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi parkir merupakan menjadi salah satu jenis PAD yang memberi kontribusi cukup besar untuk dijadikan sumber penerimaan daerah. Hasil dari pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan wilayah itu sendiri, khususnya dalam membangun fasilitas dan sarana publik.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya di Kota Medan, berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Hal tersebut otomatis juga akan meningkatkan penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik. Pada dasarnya parkir tepi jalan umum sudah diatur dengan sedemikian rupa oleh pemerintah Kota Medan melalui berbagai peraturan yang sudah ditetapkan. Namun pelaksanaan dan pengelolaannya belumlah maksimal karena adanya hambatan dalam implementasi retribusi parkir. Ketidaktransparan dan dugaan pungli petugas parkir menjadi masalah utama dalam pengelolaan retribusi parkir yang menyebabkan bocornya PAD sehingga penerimaan daerah menjadi tidak maksimal

Oleh karena itu dengan adanya permasalahan tersebut, melalui Peraturan Wali Kota Medan No.45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum, Pemko Medan menerapkan elektronik *Parking* (*e-Parking*). Adapun *e-Parking* bertujuan menghindari praktik Juru Parkir nakal sehingga kebocoran saat penarikan tarif parkir dapat diminimalisir dengan menerapkan pembayaran parkir secara elektronik yakni menggunakan metode nontunai dalam bentuk kartu seperti *e-Money* atau *e-Wallet*.

Adanya *e-Parking* ini dinilai memudahkan serta lebih efektif dan efisien bagi masyarakat, Juru Parkir maupun bagi Dinas Perhubungan Kota Medan. Hal itu karena pembayaran yang lebih transparan dan akurat, kebocoran retribusi pun juga dapat diminimalisir, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan bisa mengetahui secara rinci terkait banyaknya jumlah retribusi parkir yang masuk setiap harinya. Meskipun sistem parkir konvensional berganti menggunakan elektronik namun peran Juru Parkir tidak dihilangkan, Juru Parkir tetap dihadirkan dan bertugas mengoperasikan *alat e-Parking* untuk mendata parkir yang masuk setiap harinya.¹

Cara menggunakan *e-Parking* pun sangat mudah. Bagi pengendara yang hendak keluar tempat parkir, langsung didatangi Juru Parkir yang membawa mesin *e-Parking*. Petugas akan mengambil gambar kendaraan, dan kemudian pengendara menempelkan uang elektronik di bagian atas mesin pembayaran itu. Saldo pada uang elektronik tersebut akan terpotong secara otomatis sesuai dengan jenis kendaraan dan kelas tempat parkir itu. Pembayaran harus menggunakan

¹Pradita D, Silvanda, dan Is H. Utomo. 2021. “Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (*E-Parking*) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta. *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI) Volume 1 No.1* (h. 36-37). Publikasi Ilmiah Intelektual Madani Indonesia.

uang elektronik atau *e-Money* yang dikeluarkan oleh perbankan, semisal kartu Brizzi, *TapCash*, *e-Toll* dan uang elektronik lainnya. Setelah melakukan pembayaran, pengendara akan diberi struk yang membuktikan bahwa pembayaran telah selesai.

Untuk uang elektronik berbasis aplikasi selain pilihan kartu uang elektronik, pengendara juga bisa menggunakan aplikasi *QR Code* atau scan *QRIS*. Alat yang dipegang oleh masing-masing Juru Parkir itu juga telah dilengkapi dengan aplikasi *QRIS* yang bisa langsung dihubungkan dengan dompet elektronik yang ada pada ponsel pengendara. Aplikasi ini memang berlaku hanya untuk pengendara yang memiliki uang elektronik berbasis aplikasi seperti *Gopay*, *OVO*, *Linkaja*, *Shopeepaydll*. Pengendara hanya tinggal memindai *QRIS* menggunakan ponsel mereka.²

Pada awal tahun 2022, titik penerapane-*Parking* melalui digitalisasi jalan tahap I di kota Medan antara lain Jalan Zainul Arifin, Jalan Setia Budi, Jalan Irian Barat, Jalan Pemuda, Jalan Cirebon dan Jalan Palangkaraya. Untuk saat ini setidaknya sudah ada 150 ruas jalan yang menerapkan *e-Parking* dan ditargetkan akan meluas secara bertahap hingga ke seluruh kawasan jalan di kota Medan. Tarif parkir yang digunakan tetap seperti biasa. Ruas jalan kelas I, roda 2 sebesar Rp 2.000 dan roda 4 sebesar Rp 3.000. Untuk kelas II, roda 2 sebesar Rp 1.000 dan roda 4 sebesar Rp 2.000. Ruas jalan yang masuk kelas II termasuk kawasan Pasar Baru.

²Pekuwali, Daniel. 2021. "Cara Menggunakan *E-Parking* di Kota Medan dan Lokasi Berlaku Sistem Pembayaran Nontunai", <https://regional.kompas.com>. Diakses pada 14 Februari 2023.

Tabel 1. Kontribusi Parkir Terhadap PAD Kota Medan Tahun 2020-2022

TAHUN	PARKIR TEPI JALAN UMUM	PAD	KONTRIBUSI
2020	12,943 M	2.635,94 T	50 %
2021	13,485 M	2.159,48 T	70 %
2022	20,347 M	3.050,59 T	90 %

Sumber :Dinas Perhubungan Kota Medan

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Medan mengalami fluktuasi. Selama periode 2020-2022 mengalami penurunan yang sangat drastis ada tahun 2020 dan mengalami peningkatan semenjak penerapan *e-Parking* pada tahun 2021 hingga terus meningkat di tahun 2022. Tingkat efektifitas retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Medan tergolong dalam kriteria efektif semenjak penerapan *e-Parking*. Namun, dalam implementasinya agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, *e-Parking* tak luput dari hambatan yang ada.

Pada awal penerapan *e-Parking* di kota Medan, puluhan Juru Parkir berunjuk rasa di depan Balai Kota Medan Para Juru Parkir menolak pemberlakuan sistem *e-Parking* dan meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution segera membatalkan kebijakan itu. Menurut para pendemo, kebijakan baru tersebut akan mematikan pekerjaan mereka yang selama ini menggantungkan hidup sebagai Juru Parkir. Selain itu, kesadaran yang dimiliki masyarakat serta Juru Parkir masih kurang dikarenakan kultur menggunakan metode manual mengakibatkan masih terdapat Juru Parkir serta masyarakat yang enggan menggunakan *e-Parking*. Ini dibuktikan dengan adanya kejadian dari masyarakat yang menolak membayar parkir menggunakan *e-Toll* bahkan sempat mengancam dan menganiaya Juru

Parkir. Disamping itu juga adanya Juru Parkir yang malah meminta uang tunai dan mengaku tidak mempunyai fasilitas mesin *e-Parking* padahal sudah jelas dia menggunakan rompi parkir elektronik. Ini menandakan kurangnya profesionalitas Juru Parkir terhadap sistem *e-Parking*.

Dari permasalahan diatas dapat dipahami bahwa perlunya evaluasi agar implementasi *e-Parking* dapat mencapai tujuannya. Dengan strategi dan manajemen yang baik, *e-Parking* diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga dengan latar belakang tersebut penulis ingin meneliti tentang strategi manajemen *e-Parking* dalam meningkatkan PAD Kota Medan

B. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah strategi manajemen *e-Parking* dalam meningkatkan PAD Kota Medan?
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi sistem *e-Parking* di Kota Medan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu selain untuk pemenuhan tugas akhir juga untuk membahas yaitu:

1. Untuk mengetahui strategi manajemen *e-Parking* dalam meningkatkan PAD Kota Medan?
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang dalam implementasi sistem *e-Parking* di Kota Medan?

Adapun manfaat penelitian ini berdasarkan tujuan diatas yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain atau menjadi referensi pihak-pihak yang sedang mengkaji tentang penelitian yang sama dimasa yang akan datang serta dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan peningkatan sumber PAD.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai bahan evaluasi dalam strategi dan pengelolaan *e-Parking* Kota Medan.

D. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang mendasari penelitian ini adalah:

1. Pengertian Strategi

Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa Yunani “*Stratageta*” (*Stratos*: militer dan *Ag*: memimpin), artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal.³ Menurut Stephania K. Marrus, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.⁴

³ Assuari, Sofyan, 2004. *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, dan Strategi*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, h.168.

⁴Umar, Husein, 2010. “*Desain Penelitian Manajemen Strategik (Cara Mudah Meneliti Masalah-Masalah Manajemen Strategik Untuk Skripsi, Tesis, dan Praktek Bisnis)*. Jakarta, Rajawali Pers. h. 16.

2. Pengertian Manajemen

Secara etimologi, manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan di atur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu.⁵ Menurut George Terry, manajemen didefinisikan sebagai suatu proses khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.⁶

3. Pengertian Manajemen Strategi

Menurut Pearce II dan Robinson dalam buku Manajemen Strategis karya Eddy Yunus, ia mengatakan bahwa manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi.⁷

4. Pengertian *E-Parking*

E-Parking adalah sistem parkir yang memanfaatkan alat elektronik berupa mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dalam pembayaran parkir nontunai. Di dalam mesin EDC terdapat sebuah komponen yang bernama GUI (*Graphical User Interface*). Fungsinya adalah untuk memasukkan berbagai data, memvalidasi data yang masuk, serta membuat laporan dari analisis data yang telah dikumpulkan.

⁵ Hasibuan, *Loc. Cit.*

⁶ Yaya Ruyatnasih, S. E., & Megawati, L., 2018. *Pengantar Manajemen: Teori, Fungsi dan Kasus*. Yogyakarta, Absolute Media. h. 3-4.

⁷ Yunus, Eddy, 2016. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta, Andi, h.5

5. Dampak Peningkatan PAD

Menurut Saragih peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi daerah.⁸ Adapun dampak dari peningkatan PAD yaitu, meningkatkan kemandirian keuangan daerah, membiayai program pembangunan dan layanan publik, meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.

Strategi manajemen *e-Parking* dalam meningkatkan PAD merupakan bentuk upaya yang dilakukan untuk menyusun strategi yang tepat serta mengoptimalkan pengelolaan retribusi parkir melalui fungsi-fungsi dasar manajemen dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah. Guna mengetahui bagaimana langkah untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan analisis strategi yang terdiri dari 3 tahap yaitu formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Berikut skema kerangka fikir dalam penelitian ini.

⁸Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia



Gambar 1. Kerangka Berpikir

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih tanpa membuat perbandingan dengan variabel lain⁹ yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang gambaran latar belakang, keadaan dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁰ Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana strategi manajemen *e-Parking* dalam meningkatkan PAD kota Medan secara deskriptif berdasarkan karakteristik dan keterkaitan antar kegiatan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan adalah penelitian lapangan, maka tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan. Waktu penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yakni terhitung mulai Mei sampai dengan Juni 2023.

3. Informan Penelitian

Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu informan utama, informan kunci dan informan tambahan.

⁹ Anggara Sahya, 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, CV Pustaka Setia. hlm. 28.

¹⁰ Usman, Husaini & Akbar S. Purnomo, 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta, Bumi Aksara. hlm. 5.

a. Informan Utama

Informan utama adalah individu-individu yang terlibat secara langsung dan mengetahui secara teknis maupun detail terhadap peristiwa sosial yang akan diteliti. Informan utama penelitian ini yaitu Kabid Perparkiran Kota Medan karena berperan dalam penjelasan terkait dengan topik penelitian dan memiliki informasi tentang bagaimana strategi pada sektor parkir dalam peningkatan PAD.

b. Informan Kunci

Informan kunci adalah individu-individu yang mengetahui dan memiliki informasi data terkait proses dan hasil yang akan dicapai dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah Inspektur Sub Koordinator Parkir Khusus karena memiliki peran paling penting dalam proses pengumpulan data dan verifikasi data penelitian yaitu data tentang retribusi pelayanan parkir dan beberapa anggaran terkait.

c. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah individu-individu yang dapat memberikan informasi data tambahan terkait proses dan hasil yang akan dicapai sebagai pelengkap dalam penelitian. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah Juru Parkir serta masyarakat pengguna parkir sebagai tambahan data yang diperlukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah kualitatif, dimana sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer

dan sekunder berupa kutipan-kutipan dari buku maupun skripsi peneliti terdahulu dalam penarikan kesimpulan.

a. Data Primer

Merupakan data yang menjadi sumber pokok dalam penelitian ini atau dengan kata lain data yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang diteliti yaitu penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan. Penelitian ini juga dilakukan di ruang lingkup masyarakat. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode yaitu;

1). Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna menjaga penjajakan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum dari lokasi penelitian.¹¹Dalam penelitian ini, penulis dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa penulis sedang melakukan penelitian. Jadi informan yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau

¹¹Riyanto, Y, 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Medan, Penerbit SIC.

dilakukan dengan teras teras, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.¹²

2). Wawancara

Yaitu metode yang berupa tanya jawab secara langsung daftar pertanyaan yang telah direncanakan. Baik dengan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dilakukan pada informasi yang di pilih sesuai dengan kebutuhan yang memenuhi standar.¹³ Pada penelitian ini, penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁴

3). Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumendokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen.¹⁵ Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan peneliti teliti. Hal-hal yang dapat menjadi bahan dokumentasi yaitu berupa foto-foto dari hasil wawancara selama melakukan penelitian dan menjadikan bukti bahwa penulis benar-benar menjalankan penelitian terhadap masalah yang diangkat di dalam skripsi penulis.

¹²Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, ALFABETA. h. 145.

¹³Ulber Silalahi, 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung, PT. Refika Aditama. h. 284.

¹⁴ Sugiyono, *Op. Cit.*, h.140.

¹⁵ Bunging, Burhan, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h. 130.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber dari bahan-bahan yang dapat membantu menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan di peroleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur, dan hasil penelitian terdahulu.

Untuk mendukung data sekunder pada penelitian yang akan dilakukan, maka adabeberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat hasil penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian mengenai strategi dan pengelolaan parkir dalam meningkatkan PAD adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Skripsi berjudul “PENGELOLAAN PARKIR <i>ONLINE</i> DALAM Mendukung Peningkatan Pendapatan Retribusi Parkir Di Kota Makassar” oleh Ahmad Alqi Pajrin Tahun 2018. (http://eprints.stialanmakassar.ac.id/149/1/AHMAD%20ALQI%20PAJRIN.pdf)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan parkir online dalam mendukung peningkatan pendapatan retribusi parkir di Kota Makassar? Dari hasil penelitian yang di lakukan, pelaksanaan parkir <i>online</i> dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan retribusi parkir di Kota Makassar. Hal tersebut terlihat dari realisasi pendapatan sebelum dan sesudah dilaksanakannya

	<p>2. Skripsi berjudul “PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU” oleh Dewi Nur Azizah Tahun 2022. (http://repository.uin-suska.ac.id/61039/1/SKRIPSI%20GABUNGAN%20PDF.pdf)</p>	<p>parkir <i>online</i> selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengelola retribusi parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru belum berjalan maksimal, hal ini ditandai dengan masih adanya petugas parkir yang memungut tarif parkir tidak sesuai dengan ketentuan tarif yang terdapat di dalam</p>
--	---	---

	<p>3. Skripsi berjudul “EFEKTIVITAS SISTEM PARKIR ELEKTRONIK (<i>E-PARKIR</i>) DALAMPENGELOLAAN PARKIR DI KOTA SURAKARTA” oleh Silvanda Dewi Pradita Tahun 2021. (https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/83338/Efektivitas-Sistem-Parkir-Elektronik-E-Parkir-dalam-Pengelolaan-Parkir-di-Kota-Surakarta-Studi-Kasus-Jalan-Dr-Radjiman)</p>	<p>peraturan, kemudian masih ditemukannya beberapa petugas parkir yang tidak menggunakan atribut lengkap pada saat memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu seberapa efektif penerapan sistem <i>E-Parkir</i> dalam pengelolaan parkir di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan masih kurang efektif dinilai dari sosialisasi masih kurang diberikan pada masyarakat sehingga masih belum mengetahui <i>E-Parkir</i>. Tujuan program juga belum semuanya tercapai karena masih ditemukan beberapa juru parkir tidak mengoperasikan alat serta kesadaran juru parkir dan masyarakat kurang, namun sudah efisien menghadapi perselisihan juru parkir dengan pengguna. Meskipun demikian ketepatan sasaran sudah tepat dimana sasarannya masyarakat, Dinas</p>
--	--	--

		<p>Perhubungan Kota Surakarta dan Juru Parkir. Adapun pemantauan program sudah efektif yang diikuti pendampingan dan evaluasi perbaikan telah rutin dilaksanakan.</p>
--	--	---

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian, Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk selama di lapangan..¹⁶Ada tiga unsur utama dalam proses analisis data penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman yaitu:

1). Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuang hal-hal yang tidak penting sehingga kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan. Jadi, laporan lapangan sebagian bahan disingkat dan disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga

¹⁶*Ibid*, h. 246,

mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan.

2). Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuan adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.¹⁷ Setelah data-data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan diklarifikasikan, langkah selanjutnya adalah peneliti akan

3). Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagai dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validasinya terjamin. Tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan nilai logika, mengangkatnya menjadi temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada dan mengelompokkan data yang telah terbentuk. Langkah selanjutnya adalah melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan ‘temuan baru’ yang berbeda dari temuan yang sudah ada.¹⁸

¹⁷Basrowi & Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Rineka Cipta, h.209

¹⁸*Ibid*, h. 210.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini agar dapat dipahami, maka pembahasan penelitian ini dibagi ke dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada bab ini, akan dijelaskan uraian teori-teoriterkait strategi manajemen-*Parking* dalam peningkatan PAD.

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum Kota Medan yang dibagi menjadi dua yaitu, sejarah dan geografi Kota Medan serta wilayah administratifnya, gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu profil, visi dan misi, tupoksi serta struktur organisasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, akan dijelaskan hasil penelitian tentang strategi manajemen *e-Parking* dalam meningkatkan PAD di kota Medan. Hasil penelitian ini akan meliputi strategi manajemen *e-parking* dalam meningkatkan PAD serta faktor penghambat implementasi *e-Parking*.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, akan dijelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Teori Manajemen Strategi

1. Pengertian Manajemen Strategi

Secara etimologi, manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan di atur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu.¹⁹ Menurut George Terry, manajemen didefinisikan sebagai suatu proses khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.²⁰

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah seni untuk mengatur, memimpin, membimbing dan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Aktivitas Manajemen meliputi koordinasi termasuk perencanaan strategis, taktis, dan operasional. Manajemen juga memiliki konsep-konsep penting seperti fungsi manajemen, pengambilan keputusan, kepemimpinan, motivasi, komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi.

Menurut George Terry, manajemen memiliki fungsi yaitu:

¹⁹ Hasibuan, *Loc. Cit.*

²⁰Yaya Ruyatnasih, S. E., & Megawati, L, 2018. *Pengantar Manajemen: Teori, Fungsi dan Kasus*. Yogyakarta, Absolute Media. h. 3-4.

1). Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah sebagai hasil pemikiran yang mengarah ke masa depan, yaitu menyangkut serangkaian tindakan yang berdasarkan pemahamanyang mendalam terhadap semua faktor yang terlibat dan yang diarahkan kepada sasaran khusus. Dengan kata lain, perencanaan ialah penentuan serangkaian tindakan berdasarkan pemilihan dari berbagai alternatif data yang ada, dalam hal ini dirumuskan dalam bentuk keputusan yang akan dikerjakan untuk masa yang akan datang dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan. Penentuan tujuan atau sasaran adalah penting bagi setiap organisasi karena:

- a. Tujuan atau sasaran bersifat memberikan arah.
- b. Dengan adanya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan akan membantu orang-orang dalam organisasi untuk memotivasi diri.
- c. Tujuan atau sasaran akan memfokuskan usaha pelaksana organisasi.
- d. Sebagaimana disadari bahwa keberadaan sumber daya umumnya adalah terbatas. Dengan adanya tujuan atau sasaran dapat memprioritaskan pengalokasian sumber daya untuk tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
- e. Tujuan atau sasaran menjadi pedoman bagi penyusunan rencana strategis maupun rencana operasional organisasi serta pemilihan alternatif keputusan.

2). Pengorganisasian (*Organizing*)

Fungsi berikutnya adalah menciptakan organisasi untuk melaksanakan rencana yang telah dirumuskan. Organisasi pada hakikatnya mempunyai tiga komponen, yaitu fungsi, personalia dan faktor-faktor sarana fisik. Proses organisasi berusaha mempersiapkan ketiga komponen tersebut sedemikian rupa

agar dapat memperlancar pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, pengorganisasian didefinisikan sebagai suatu proses menciptakan hubungan antara personalia, fungsi-fungsi dan faktor fisik agar kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama.

Manullang berpendapat bahwa pengorganisasian adalah pengelompokan aktivitas yang akan dilakukan atau pendistribusian tugas dan fungsi kepada setiap individu yang ada dalam organisasi. Disamping itu, pengorganisasian juga dimaksudkan untuk menentukan dan menetapkan kedudukan serta sifat hubungan antar masing-masing unit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah seluruh aktivitas manajemen yang mengimplementasikan dalam bentuk pembagian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam organisasi. Hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif, efisien dan rasional.²¹

3). Pengarahan (*Actuating*)

Fungsi selanjutnya yaitu pengarahan, fungsi pengarahan ini ialah gerak pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Pengarahan dapat diartikan sebagai suatu aspek hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan pikiran dan tenaganya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berarti ruang lingkup pengarahan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

4). Pengawasan (*Controlling*)

²¹ Torang, Syamsir, 2014. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung, ALFABETA. h.171.

Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilakukan dalam manajemen, karena dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah tercapai. Dalam hal ini berarti bahwa dengan pengawasan akan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengertian Pengawasan adalah sebagai suatu kegiatan mendeterminasi apa saja yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan untuk segera mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan dan hambatan, sekaligus mengadakan koreksi untuk memperlancar tercapainya tujuan. Fungsi ini dapat menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang diinginkan.

Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa Yunani “*Stratageta*” (*Stratos*: militer dan *Ag*: memimpin), artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal.²² Secara terminologi, strategi adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan, strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya memberi arah, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi adalah rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apa pun yang harus dilakukan dalam bisnis, bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggannya untuk mencapai tujuan.²³

Pengertian lainnya seperti yang diutarakan Craig dan Grant adalah strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah organisasi dan

²² Assuari, Sofyan, 2004. *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, dan Strategi*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, h.168.

²³ Stephen & Coulter, 2007. *Management*. Jakarta, Indeks. h. 231.

arah tindakan serta alokasi sumber daya yang di perlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan.²⁴

Strategi merupakan serangkaian keputusan atau tindakan mendasar yang disusun oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.²⁵ Menurut Chandler, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Menurut Stephania K. Marrus, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.²⁶

Untuk melakukan strategi, dilakukan penyusunan strategi yang pada dasarnya terdiri dari 3 tahap, yaitu:

1). Penilaian Keperluan Penyusunan Strategi

Sebelum strategi disusun, perlu ditanyakan terlebih dahulu apakah memang penyusunan strategi (baik strategi baru maupun perubahan strategi) perlu untuk dilakukan ataukah tidak. Hal ini terkait dengan apakah strategi yang akan dilakukan memang sesuai dengan tuntutan perubahan di lingkungan ataukah sebaliknya.

2). Analisis Situasi

²⁴Kasmir, 2009. *Pemasaran Bank*. Jakarta, Pranada Media. h.59-60.

²⁵Kusumadmo, 2013. *Manajemen Strategik Pengetahuan*. Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.

²⁶Umar, Husein, 2010. "*Desain Penelitian Manajemen Strategik (Cara Mudah Meneliti Masalah-Masalah Manajemen Strategik Untuk Skripsi, Tesis, dan Praktek Bisnis)*". Jakarta, Rajawali Pers. h. 16.

Pada tahap ini organisasi perlu melakukan analisis mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi sekaligus juga menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi.

3). Pemilihan Strategi

Setelah organisasi melakukan analisis terhadap keadaan internal dan eksternal organisasi, maka organisasi perlu menentukan strategi yang akan diambil dari berbagai alternatif yang ada. Pada dasarnya alternatif strategi terbagi kedalam tiga bagian besar, yaitu strategi yang cenderung mengambil risiko, yaitu strategi menyerang atau agresif (*aggressive or offensive strategy*), strategi yang cenderung menghindari risiko, yaitu strategi bertahan (*defensive strategy*), serta strategi yang memadukan antara mengambil risiko dan menghindari risiko. Artinya, berbeda di tengah-tengah. Strategi ini sering dinamakan sebagai *turn-around strategy*.²⁷

Manajemen strategi adalah seperangkat keputusan dan tindakan yang digunakan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi-strategi yang berdaya saing tinggi dan sesuai bagi organisasi dan lingkungannya untuk mencapai sasaran organisasi.²⁸ Adapun pengertian manajemen strategi menurut ahli, seperti yang dikatakan Pearce II dan Robinson dalam buku Manajemen Strategis karya Eddy Yunus, ia mengatakan bahwa manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi.²⁹

²⁷Sule, T. Ernie & Saefullah, Kurniawan, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, Prenata Media hlm. 136.

²⁸Daft L. Richard, 2002. *Manajemen*. Jakarta, Erlangga, hlm.301

²⁹ Yunus, Eddy, 2016. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta, Andi, h.5

Manajemen strategi memainkan peran yang besar dari apa yang dilakukan manajer. Manajemen strategi adalah apa yang dilakukan manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Ini merupakan tugas penting yang melibatkan semua fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.³⁰

2.Karakteristik Manajemen Strategi

Manajemen strategi senantiasa menyikapi dinamika terjadinya suatu perubahan lingkungan sehingga dapat berpengaruh terhadap implementasi manajemen itu sendiri serta berupaya untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut, berikut ini beberapa karakteristik manajemen strategi:

- a. Manajemen strategi bersifat jangka panjang
- b. Manajemen strategi bersifat dinamik
- c. Manajemen strategi merupakan sesuatu yang berpadu oleh manajemen operasional
- d. Manajemen strategi perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak
- e. Manajemen strategi berorientasi dan mendekati untuk masa depan
- f. Manajemen strategi senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia.³¹

3.Manfaat Manajemen Strategi

Manfaat yang diperoleh organisasi jika mereka menerapkan manajemen

³⁰Stephen & Coulter, *Op, Cit.*, h. 212-213

³¹Yunus, Eddy, *Loc. Cit.*

strategi, yaitu:

1. Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju
 2. Membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi
 3. Membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif
 4. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko
 5. Aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan organisasi untuk mencegah munculnya masalah dimasa datang
 6. Keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaan
 7. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi
 8. Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi.³²
4. Proses Manajemen Strategi

Menurut Umar Husein, proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahap:

1) Formulasi Strategi

Formulasi strategi mencakup pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu yang akan digunakan seterusnya.

³²Wahyudi S. Agustinus, 1996. *Manajemen Strategi*. Jakarta, Binarupa Aksara, h.19

2) Implementasi Strategi

Implementasi strategi memerlukan organisasi untuk menetapkan tujuantahunan, merancang kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang diformulasikan dapat dieksekusi. Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya strategi-mendukung, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengalihkan upaya pemasaran, mempersiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi. Implementasi strategi sering disebut "tahap aksi" manajemen strategis. Implementasi strategi berarti memobilisasi karyawan dan manajer untuk menempatkan strategi dirumuskan ke dalam tindakan. Sering dianggap sebagai tahap paling sulit dalam manajemen strategis, implementasi strategi memerlukan disiplin pribadi, komitmen, dan pengorbanan.

3) Evaluasi Strategi

Strategi evaluasi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Manajer sangat perlu tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik. Evaluasi Strategi adalah cara utama untuk mendapatkan informasi ini. Semua strategi tunduk pada modifikasi masa depan karena faktor eksternal dan internal yang terus berubah. Tiga kegiatan evaluasi strategi mendasar adalah mengkaji faktor eksternal dan internal yang merupakan dasar untuk strategi saat ini, mengukur kinerja, dan mengambil tindakan korektif.³³

³³Husein, Umar, 2020. *Manajemen Strategik: Konsep dan Analisis*. Jakarta, The Jakarta Business Research Center, hlm. 3

C.E-Parking

1.Pengertian *E-Parking*

E-Parking adalah sistem parkir yang memanfaatkan alatelektronik berupa mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dalam pembayaran parkir nontunai. Di dalam mesin EDC terdapat sebuah komponen yang bernama GUI (*Graphical User Interface*). Fungsinya adalah untuk memasukkan berbagai data, memvalidasi data yang masuk, serta membuat laporan dari analisis data yang telah dikumpulkan. *E-Parking* memungkinkan Jukir dan pengguna parkir untuk melakukan transaksi retribusi parkir melalui metode pembayaran nontunai yang tersedia, seperti uang elektronik atau dompet digital. Dengan menggunakan mesin ini, transaksi dilakukan secara digital dan otomatis, sehingga meminimalkan kesalahan Jukir dalam mengelola parkir.



Gambar 2. Mesin EDC

2. Mekanisme *E-Parking*

1). Cara Pembayaran *E-Parking*



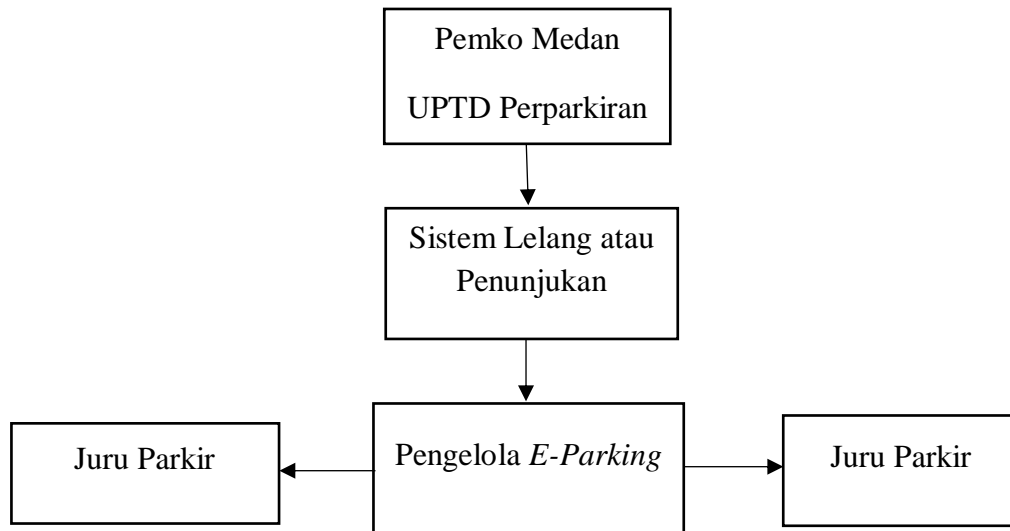
Gambar 3. Proses Pembayaran *E-Parking*

Cara pembayaran *e-Parking* yaitu dengan menggesek atau menempelkan kartu uang elektronik pada mesin EDC *e-Parking* yang telah dibawa oleh Juru Parkir. Saldo pada uang elektronik tersebut akan terpotong secara otomatis sesuai dengan jenis kendaraan dan kelas tempat parkir itu. *E-Money* yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaranyaitu kartu debit ATM, *Brizzi*, *TapCash*, *e-Toll* dan uang elektronik lainnya. Metode berikutnya yaitu dengan melakukan scan *QRIS* pada *barcode* yang tersedia pada mesin atau *ID Card* jukir menggunakan *smartphone* melalui *aplikasi e-Wallet* yang didukung. Adapun beberapae-*Wallet* bisa dengandigunakan yaitu *Gopay*, *OVO*, *DANA*, *Linkaja*, *Shopeepay* dll. Setelah melakukan pembayaran, pengendara akan diberi struk atau bukti bahwa pembayaran telah selesai. Nantinya, hasil penerimaan retribusi akan langsung masuk ke kas daerah.

2). Mekanisme Pemungutan *E-Parking*

Dalam pengelolaan dan pemungutan retribusi, Pemko Medan bekerjasama dengan pihak ketiga dari sistem lelang dan sistem penunjukan baik perorangan ataupun organisasi dimana menggunakan sistem bagi hasil. Lebih jelasnya

mengenai sistem pemungutan retribusi parkir oleh UPTD Perparkiran Kota Medan dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



Gambar 5. Mekanisme Pemungutan *E-Parking*

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan mengenai sistem pemungutan retribusi parkir itu dari pihak Pemerintah Kota Medan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Medan menggandeng pihak ketiga melalui sistem lelang dan sistem penunjukan. Pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemko setelah memenuhi persyaratan kerjasama diberi izin dan hak sebagai pengelola parkir. Kemudian dalam pengelolaan parkir, pihak ketiga mempekerjakan petugas parkir yang nantinya akan memungut retribusi parkir dengan alat *e-Parking* kepada pengguna parkir.

Untuk pihak ketiganya sendiri akan dilakukan pemilihan lelang atau kerjasama berdasarkan penilaian kualitas serta anggaran organisasi yang akan bekerjasama dengan pihak Dishub.

Pada peraturan Walikota Medan No. 45 Tahun 2021 Tanggal 17 September 2021 tentang Tata Cara Parkir Umum, menetapkan :

a. Mekanisme Bagi Hasil Pengelolaan *e-Parking*

- 1) Untuk Kelas I, 60 % untuk Pihak Ketiga dan 40 % untuk Pemko
- 2) Untuk Kelas II, 65 % untuk Pihak Ketiga dan 35 % untuk Pemko

b. Dalam hal pendapatan lebih rendah dari potensi parkir, Pihak Ketigawajib menyetorkan :

- 1) Untuk Kelas I, 40 % dari potensi parkir
- 2) Untuk Kelas II, 35 % dari potensi parkir

3. Kelebihan dan Kekurangan *E-Parking*

a. Kelebihan :

1. Kemudahan Pembayaran

Di era yang serba satu genggam ini, sistem *e-Parking* memberikan kemudahan bagi pengguna dalam membayar retribusi parkir yaitu dengan menggunakan kartu *e-Money* atau melalui *scan QRIS* dengan *smartphone* sehingga jauh lebih praktis.

2. Meminimalisir Kebocoran PAD

E-Parking menggunakan sistem pembayaran nontunai secara elektronik yang mana hasil penerimaan retribusi yang dipungut oleh Jukir akan langsung masuk ke kas daerah sehingga meminimalisir kebocoran PAD akibat dari pungli ataupun Jukir liar.

3. Transparansi Pendapatan

Sistem *e-Parking* memungkinkan transparansi dalam proses pembayaran dan pendapatan retribusi. Informasi mengenai pendapatan parkir dapat diakses secara *online* melalui situs *e-Parking* atau Pemko Medan. Hal ini membantu mencegah praktik korupsi dan pungli atau penyalahgunaan dalam pengelolaan parkir dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan masukan.

2). Kekurangan :

a. Sangat Mengandalkan Koneksi Internet

E-Parking sangat bergantung koneksi internet yang stabil. Jika terjadi gangguan teknis atau masalah jaringan, sistem *e-Parking* dapat menjadi tidak berfungsi atau error. Hal ini dapat mengganggu proses pengelolaan parkir.

b. Biaya Implementasi yang Mahal

Implementasi sistem *e-Parking* membutuhkan biaya yang mahal, termasuk pengadaan alat dan pelatihan Juru Parkir. Biaya ini mungkin menjadi hambatan bagi pemerintah atau pengelola parkir yang memiliki keterbatasan anggaran.

Adapun pihak ketiga yang bekerjasama dalam mengelola parkir terdiri dari beberapa organisasi yaitu:

Bank Sumut	CV. Indra Maju Bersama
Koperasi Bersama Sukses Mandiri	CV. Citra Pembaharuan Mandiri
PT. LGE	CV. Siboru Torop Nauli
PT. Bintang Pertama Makmur	CV. Tri Prima Nusantara
PT. <i>Center Park Citra Corpora</i>	CV. Pamong
PT. Fan Solusindo Bersama	CV. Adikara Cipta Saran
PT. Perimeter Smarter Perkasa	PT. <i>Centre Park Corporate</i>
PT. Sentral <i>Parking</i> Jaya	PT. MMH Berkah Jaya

Untuk saat ini lokasi penerapan e-Parking di Kota Medan ada di 150 ruas jalan yaitu:

Tabel3. Lokasi Dan Jukir *E-Parking*

NO.	JALAN	JUKIR	NO.	JALAN	JUKIR
1.	Jl. Merak Jingga	22	34.	Jl. Nibung Utama	2
2.	Jl. Merak Jingga Dalam	8	35.	Jl. Razak Baru	4
3.	Jl. Puteri Hijau	20	36.	Jl. Majapahit	6
4.	Jl. Puteri Hijau II	3	37.	Jl. Gatot Subroto	17
5.	Jl. HM. Yamin	2	38.	Jl. Iskandar Muda	6
6.	Jl. Prof. HM. Yamin	2	39.	Jl. S.Parman	18
7.	Jl. Timor	8	40.	Jl. Pabrik Tenun	4
8.	Jl. Veteran	6	41.	Jl. Karya	6
9.	Jl. Sutomo	6	42.	Jl. Sekip	14
10.	Jl. Pandu	6	43.	Jl. Guru Patimpus	2
11.	Jl. Sutomo	10	44.	Jl. Porsea	1
12.	Jl. Rahmadsyah	4	45.	Jl. Bandung	2
13.	Jl. Samarinda	1	46.	Jl. Zainul Arifin	8
14.	Jl. Sambas	7	47.	Jl. Setia Budi	25
15.	Jl. Amuntai	2	48.	Jl. Jawa	2
16.	Jl. Perniagaan	12	49.	Jl. Pemuda	7
17.	Jl. Guang Zhu (Jl. Ahmad Yani V)	5	50.	Jl. Pemuda	10
18.	Jl. Ahmad Yani III (Jl. Perdagangan)	1	51.	Jl. Pemuda Baru III	1
19.	Jl. Kumango	3	52.	Jl. Pemuda Baru II	1
20.	Jl. Perniagaan Baru	1	53.	Jl. Pemuda Baru I	1
21.	Jl. Pembelian	2	54.	Jl. Cirebon	8
22.	Jl. Ahmad Yani II	4	55.	Jl. Palangkaraya	8
23.	Jl. Bukit Barisan	5	56.	Jl. Palangkaraya Baru	1
24.	Jl. Stasiun Kereta Api	5	57.	Jl. Bandung	1
25.	Jl. Pulau Penang	3	58.	Jl. Jember	1
26.	Jl. Palang Merah	4	59.	Jl. Bogor	1
27.	Jl. DI. Panjaitan	13	60.	Jl. Kotanopan I	1
28.	Jl. Pringgann	4	61.	Jl. Kotanopan II	1
29.	Jl. Iskandar Muda	8	62.	Jl. Pakantan	1
30.	Jl. Orion	5	63.	Jl. Barus	1
31.	Jl. Rotan Proyek	3	64.	Jl. Kejaksaan	5
32.	Jl. Rotan	9	65.	Jl. KL. Yos Sudarso	14
33.	Jl. Kota Baru III	6	66.	Jl. Adam Malik	5

67.	Jl. Ahmad Yani	5	104.	Jl. Sembada	2
68.	Jl. Balai Kota	4	105.	Jl. Pasar Baru	5
69.	Jl.Hindu	1	106.	Jl. Mahkamah	5
70.	Jl. Jamin Ginting	26	107.	Jl. H.Misbah	17
71.	Jl. Dr. Mansyur	20	108.	Jl. Samanhudi	5
72.	Jl. Makmum Al Rasyid	19	109.	Jl.Bromo	5
73.	Jl. Suprpto	3	110.	Jl. Denai	10
74.	Jl. Palang Merah	7	111.	Jl. Suka Mulia	6
75.	Jl.Brigjend Katamso	29	112.	Jl. Mangkubumi	5
76.	Jl. Brigjend Zein Hamid	48	113.	Jl. Cakrawati	5
77.	Jl. Thamrin	24	114.	Jl. Kol. Sugiono	16
78.	Jl. KS. Tubun	24	115.	Jl. Listrik	5
79.	Jl. Asia	38	116.	Jl. Bogor	8
80.	Jl. Sutrisno	14	117.	Jl. Bandung	4
81.	Jl. SM. Raja	58	118.	Jl. Semarang	11
82.	Jl.Hm. Joni	24	119.	Jl. Medan	13
83.	Jl. Teuku Umar	7	120.	Jl. Surakarta	5
84.	Jl. Airlangga	2	121.	Jl. Selat Panjang	4
85.	Jl. Kediri	3	122.	Jl. Medan Baru	2
86.	Jl. Cik Di Tiro	7	123.	Jl. Bawean	6
87.	Jl. Jenggala	2	124.	Jl. Bangka	5
88.	Jl. Muara Takus	3	125.	Jl. Karimun	1
89.	Jl. Kartini	3	126.	Jl. Riau/ Jl. Riau Baru	5
90.	Jl. Teuku Daud	3	127.	Jl. Merbabu	12
91.	Jl. Cut Mutia	1	128.	Jl. Merapi	2
92.	Jl. Uskup Agung	1	129.	Jl. Kawi	1
93.	Jl. Hang Tuah	1	130.	Jl. Sindoro	2
94.	Jl. A Rifai	1	131.	Jl. Cokroaminoto	11
95.	Jl. Bilal	6	132.	Jl. Jambi	2
96.	Jl. Budi Pembangunan	3	133.	Jl. Sei Kera	6
97.	Jl. Budi Pekerti	1	134.	Jl. Kalimantan	3
98.	Jl. Amir Hamzah	8	135.	Jl. Wahidin	24
99.	Jl. Raden Saleh	6	136.	Jl. Tapanuli	3
100.	Jl. A. Yani I	1	137.	Jl. Kapt. Jumhana	3
101.	Jl. A. Yani IV	1	138.	Jl. Fl. Tobing	9
102.	Jl. Kepribadian	3	139.	Jl. Gedeh	5
103.	Jl. Ar.Syihab	3	140.	Jl. Talaud	3

141.	Jl. Martinus Lubis	10
142.	Jl. Seram	1
143.	Jl. Padangsidempuan	2
144.	Jl. Halat	17
145.	Jl. Megawati	6
146.	Jl. Gedung Arca	9
147.	Jl. DI. Panjaitan	7
148.	Jl. Wahid Hasyim	6
149.	Jl. Sei Mencirim	5
150.	Jl. Abdullah Lubis	7

C. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan³⁴. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

Retribusi berbeda dengan pajak yang merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

³⁴Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta, Andi. Hlm. 14.

Direktorat Keuangan Jenderal Pemerintah Dalam Negeri menjelaskan bahwa sifat retribusi adalah³⁵:

1. Paksaan bersifat ekonomis.
2. Adanya imbalan secara langsung kepada pembayar.
3. Walaupun memenuhi persyaratan baik formal dan materil tetapi tetap ada alternatif untuk menolak atau menerima pembayaran.
4. Dalam hal ini retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu tetapi dalam banyak hal retribusi tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Menurut Pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- | | |
|--|---|
| a. Retribusi Pelayanan Kesehatan | f. Retribusi Pelayanan Pasar |
| b. Retribusi Pelayanan Persampahan | g. Retribusi Pengujian Kendaraan |
| c. Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil | h. Retribusi Pemeriksaan Alat Kebakaran |

³⁵ Kemendagri, "Retribusi Daerah", melalui <http://Djkd.kemendagri.go.id>, diakses Senin, 15 Mei 2023, Pukul 21.00 WIB.

- | | |
|---|---|
| d. Retribusi Pelayanan Pemakaman | i. Retribusi Cetak Peta |
| e. Retribusi Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan Umum | j. Retribusi Pengujian Kapal
Perikanan |

2. Retribusi Jasa Usaha

Menurut Pasal 1 angka 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Jasa 20 Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta. Retribusi Jasa Usaha ini terdiri dari:

- | | |
|--|---|
| a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | k. Retribusi Penyebrangan di
Atas Air |
| b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Perkantoran | l. Retribusi Pengolahan
Limbah Cair |
| c. Retribusi Tempat Pelelangan | m. Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah |
| d. Retribusi Terminal | |
| e. Retribusi Tempat Khusus Parkir | |
| f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan | |
| g. Retribusi Penyedotan Kaktus | |
| h. Retribusi Rumah Potong Hewan | |
| i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal | |
| j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga | |

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Pasal 1 angka 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dikemukakan bahwa Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin

kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang/prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dikemukakan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- b. Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- c. Retribusi Izin Gangguan.
- d. Retribusi Izin Trayek.

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah retribusi parkir yang menggunakan tepi jalan sebagai ruang parkirnya. Areal parkir yang digunakan adalah lahan yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 Pasal 9, penetapan tempat parkir di tepi jalan umum yaitu:

1. Tempat parkir di tepi jalan umum ditetapkan oleh Walikota.
2. Penetapan tempat parkir di tepi jalan umum dapat didelegasikan kepada pejabat dan instansi yang ditunjuk.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penetapan tempat parkir di tepi jalan umum diatur dengan Peraturan Walikota.

Adapun struktur dan besarnya tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2014 Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3. Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No.	Jenis Kendaraan	Lokasi Parkir (Kelas I)	Lokasi Parkir (Kelas II)
1.	Truk dengan gandengan, trailer.	Rp. 10.000,00/ sekali parkir	Rp. 5.000,00/ Sekali parkir
2.	Truk, bus, alat besar/berat.	Rp. 6.000,00/ sekali parkir	Rp. 4.000,00/ sekali parkir
3.	Truk mini dan kendaraan lain yang sejenisnya.	Rp. 5.000,00/ sekali parkir	Rp. 3.000,00/ sekali parkir
4.	Pick up, mobil penumpang, mini bus, dan kendaraan lain yang sejenis.	Rp. 3.000,00/ sekali parkir	Rp. 2.000,00/ Sekali parkir
5.	Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3 (tiga).	Rp. 2.000,00/ sekali parkir	Rp. 1.000,00/ sekali parkir

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan:

a. Klasifikasi Jalan

b. Jenis Kendaraan

c. Waktu Penggunaan

Pemungutan retribusi parkir adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Secara umum, fungsi utama pemungutan retribusi adalah hampir sama dengan pajak, yaitu sebagai pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kenaikan penerimaan retribusi khususnya retribusi parkir akan berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan asli daerah (PAD).

D.Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari hasil pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta sumber pendapatan lain yang sah. PAD menjadi sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan³⁶.

Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak, retribusi, hasil organisasi milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti laba, deviden dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman lain-lain. Sektor pajak dan retribusi daerah

³⁶Muslich, M. A., & Lestari, E. P, 2022. *Analisis Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau. Vol.2, No.2.Hlm. 99.

merupakan sektor pendapatan asli daerah yang diterima secara rutin. Besarnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah untuk setiap daerah berbeda-beda, tergantung pada potensi dan pengelolaan yang dilakukan daerah yang bersangkutan beberapa daerah pariwisata menikmati penerimaan PAD yang besar karena banyaknya aktivitas bisnis yang luas serta memiliki banyak jasa umum dan ini berbeda dengan daerah yang masih terpencil.

Negara mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum atau negara melakukan tugas pelayanan publik. Menjalankan tugas pelayanan publik ini negara bertindak atas kewenangan yang ada padanya baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau melalui campur tangan pemerintah (*freiesermesen*) dalam rangka mencapai tujuan negara.³⁷

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan asas desentralisasi yaitu memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.³⁸ Penyelenggaraan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dapat dilakukan dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. “Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara”.³⁹

³⁷ Anggriani, Jum, 2014. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Graha Ilmu. hlm. 88.

³⁸ Huda, Ni'Matul, 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta, RajaGrafindo Persada. hlm. 329.

³⁹ HR, Ridwan, 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, RajaGrafindo Persada. hlm. 101.

Wewenang adalah bagian penting administrasi negara. Ketika undang-undang memberikan wewenang kepada badan atau pejabat pemerintahan, mungkin saja berarti memberikan tugas kewajiban yang luas kepada badan atau pejabat pemerintah untuk memenuhi tujuan kebijakan tertentu. Hal itu dapat pula menetapkan kewajiban khusus kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan suatu tindakan ketika persyaratan-persyaratan tertentu telah terpenuhi dan mungkin akan memberikan wewenang kepada otoritas yang terkait.⁴⁰

Sebagai daerah otonom yang mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri maka pendapatan daerah sangatlah penting dalam rangka pembiayaan urusan rumah tangga daerah.

2.Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kekuasaan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa PAD bersumber dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah

⁴⁰A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017. *Hukum Administrasi*. Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 108.

4. Lain-lain PAD yang sah

1). Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan jenis pemungutannya, pajak dibagi yaitu:

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah sendiri;
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh Pemda.
- c. Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh Pemda.
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi pungutannya kepada, dibagi hasilkan dengan atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemda.

2). Retribusi Daerah

Merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih organisasi daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik organisasi daerah yang dipisahkan sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat organisasi daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah

pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan meningkatkan perekonomian daerah.

4). Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

1. Hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

3. Dampak Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Saragih peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi daerah.⁴¹ Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki berbagai

⁴¹Saragih, Juli Panglima. Loc. Cit.

fungsi dan dampak peningkatan positif yang sangat penting dan cukup signifikan bagi pemerintah daerah dan masyarakat di daerah tersebut, antara lain yaitu:

1). Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah

Fungsi utama dari PAD adalah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Dengan memiliki sumber pendapatan yang cukup, pemerintah daerah dapat membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat tanpa tergantung pada pemerintah pusat atau sumber pendanaan dari luar daerah.

2). Membiayai Program Pembangunan dan Layanan Publik

Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan lain-lain. Dengan adanya PAD yang cukup, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dari program-program tersebut sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih besar.

3). Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dengan memperbaiki infrastruktur, memberikan insentif bagi investor, meningkatkan daya saing daerah, dan lain-lain. Dengan adanya investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, masyarakat dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kualitas hidup.

4). Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Dengan adanya PAD yang cukup, pemerintah daerah dapat membiayai berbagai program yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, infrastruktur, dan lain-lain. Dengan adanya pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat dapat merasa lebih nyaman dan aman, serta memperoleh manfaat yang lebih besar.

5). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti bantuan tunai, beasiswa, dan lain-lain. Dengan adanya bantuan sosial yang tepat sasaran, masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dan kesejahteraan dapat tercapai

\